

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partai politik merupakan organisasi atau lembaga yang menaungi masyarakat berdasarkan afiliasi politik dengan tujuan tertentu. Sebagai sebuah organisasi, setiap partai memiliki ideologi yang identik, hal ini yang menjadi landasannya dalam menyusun agenda politik. Ideologi ini juga yang kemudian menjadi bahannya dalam merumuskan strategi dan menempatkan partainya dalam percaturan politik nasional. Di negara demokrasi, partai politik merupakan bagian yang terpenting, ini yang membuat mengapa dapat dikatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang menempatkan partai sebagai elemen yang kokoh dalam pembangunan sebuah negara.

Kedudukan partai politik ditengah-tengah kehidupan politik dapat dirasakan melalui kehadirannya sebagai wadah atau untuk berkumpulnya masyarakat. Tujuan dari wadah ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, dapat dilihat bahwa partai politik sebagai tempat menyalurkan aspirasi, dapat dilihat bahwa partai politik sebagai lembaga pendidikan politik, dan tidak dapat dipungkiri bahwa ia juga sebagai mesin yang membawa individu pada posisi politik tertentu. Hal diatas menunjukkan bahwa kehadiran partai politik telah melahirkan sebuah stigma, bahwa ia memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan politik sebuah negara. Peran dan fungsi partai politik tidak hanya diperuntukkan untuk konstituennya saja, melainkan juga dalam pengelolaan bangsa dan negara. Maka dari itu, baik dan buruk pelaksanaan peran dan fungsinya akan berdampak pada baik dan buruknya sebuah bangsa dan negara.

Berdasarkan tinjauan fungsi, maka partai politik memiliki enam fungsi yaitu sebagai Sarana komunikasi politik; Sarana sosialisasi politik; Sarana rekrutmen; Sarana pengatur konflik; Sarana artikulasi kepentingan dan sarana agregasi kepentingan. Keenam fungsi tersebut, menempatkan partai politik dalam kedudukan peran yang sangat strategis di sebuah negara demokrasi. Sebagai contoh di Indonesia, partai politik berperan sebagai pilar demokrasi. Hal ini

berarti bahwa demokrasi yang tidak melibatkan partai politik dianggap sebagai gambaran akan kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi. Upaya dalam mengisi kekuasaan hanya akan dapat diraih melalui agenda dan strategi politik. Hal inilah yang menjadi cikal-bakal dari lahirnya berbagai taktik dan cara yang dipilih partai untuk memperjuangkan kekuasaan. Upaya politik semacam ini merupakan esensi dari politik yang menurut Laswell yaitu *“who gets what, when and how”*, artinya tentang “siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana”. Jenis-jenis strategi yang dipilih dalam mewujudkan agenda politik, jika dikaji sangatlah beragam dan luas, namun secara singkat strategi politik dapat dibagi menjadi tiga poin penting, yaitu strategi tentang perbaikan, pencapaian, dan upaya mempertahankan sesuatu. Ketiga hal tersebut menjadi orientasi kerja partai politik dalam merumuskan strategi politiknya.

Akibat dari luasnya peran dan kedudukan partai politik di suatu negara, termasuk juga soal bagaimana rumitnya ia dalam merumuskan strategi. Membuat harapan masyarakat padanya semakin meningkat. Namun ditengah besarnya harapan masyarakat yang dialamatkan kepada partai politik melalui kader politiknya, membuat partai politik dewasa ini diterpa berbagai persoalan, dan dapat dikatakan bahwa hingga kini masih belum terselesaikan dengan baik. Satu diantara banyaknya masalah yang menimpa partai politik dan kader politik ialah masalah korupsi. Persoalan ini bukan hanya mengusik eksistensinya sebagai sebuah organisasi, namun juga berdampak besar terhadap sistem politik bahkan manajerial pemerintah yang berkaitan dengannya. Tindakan koruptif dewasa ini bukanlah sebuah perkara yang tabu, tindakan ini bahkan dapat melibatkan semua elemen masyarakat, terlebih partai politik sebagai elemen utama dalam kegiatan demokrasi. Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan partai politik dan kadernya nyatanya bukan hanya terjadi eksternal partai saja, melainkan juga internal partai politik itu sendiri. Alasannya ialah proses politik partai dapat dipermainkan, keinginan untuk memperoleh sesuatu secara instan, ada oknum internal yang “nakal”, mengabaikan proses sampai pengelolaan organisasi yang lemah.

Partai yang dianggap lembaga pendidikan politik, hari ini telah merubah fungsi sebagai lembaga politik praktis. Ini membuat pendidikan politik yang

Muhammad David, 2019

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

terbentuk melalui kegiatan kepartaian cenderung minim, karena hakikatnya telah berubah menjadi kegiatan untuk merebut ambisi politik publik saja. Apabila ini tidak menjadi sebuah perhatian bagi semua warga negara, maka akan terus berdampak buruk pada perkembangan demokrasi di sebuah negara. Akibat dari konsentrasi partai politik yang belum berfokus pada perbaikan pendidikan politik, maka tidak publik tidak mampu berharap lebih kepada para kader politik yang menjadi pilihan-pilihan politik yang tersedia.

Hal ini juga diperparah dengan diberikannya kesempatan bagi para kader yang telah tersandung kasus korupsi untuk bertarung pada kontestasi politik. Fenomena tersebut setidaknya dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, bahwa tidak dapat dihindari bahwa mereka yang notabene merupakan para eks-terpidana kasus korupsi ialah sebagai warganegara yang punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Namun dilain sisi, hal ini masih menjadi pertanyaan publik, bahwa apakah partai politik tidak memiliki cukup kemampuan untuk merekrut kader politik yang bersih dari catatan buruk?, maka apa yang sedang dimainkan oleh partai politik saat ini, dapat dipandang sebagai paradigmatis massa yang besar dengan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan partai semata. Di lain soal, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa ongkos politik pada sistem demokrasi kepartaian yang mahal, akhirnya membuat partai politik tidak dapat menutup mata dalam hal kebutuhannya terhadap dana yang masuk maupun yang akan dikeluarkan demi kegiatan kampanye dan sosialisasi politik. Penulis melihat, bahwa selagi masih banyaknya praktik-praktik politik yang berbiaya tinggi maka sulit kiranya untuk dapat berpikir secara idealis dalam melihat persoalan politik, khususnya dalam pendanaannya. Fenomena tersebut sebagai bagian dari bagaimana partai politik tidak bisa menolak anggapan bahwa kebutuhan yang besar, hanya akan dapat diperoleh melalui kegiatan politik kepartaian melalui kader-kader politik yang punya potensi untuk mendanai kegiatan politiknya.

Dampak dari masalah korupsi yang terjadi di tubuh partai politik dan kader politik tidak dapat dianggap sebelah mata. Dalam skala kecil, masalah ini akan mengubah tatanan idealisme partai politik yang telah digagas. Dalam skala besar,

**Muhammad David, 2019**

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

dampaknya terhadap partai politik itu sendiri ialah turunnya tingkat kompetensi elit partai. Implikasi tersebut didukung hasil penelitian Irham (2016) tentang korupsi yang terjadi dalam tubuh partai politik melalui sistem politik, mengungkapkan bahwa “Tindakan koruptif dalam proses politik partai akan membawa institusi ini pada minimnya elit politik yang memiliki kompetensi”. Akan muncul banyak elit politik dengan kompetensi rendah yang sesukanya mengelola sistem ini, bagaimanapun bahwa yang namanya sistem politik hanyalah sebuah perangkat, sedangkan manusia ialah pengelola perangkat tersebut.

Lebih lanjut bahwa, masalah koruptif juga menyebabkan rusaknya solidaritas organisasi, kekacauan dalam pengelolaan, bahkan dapat menyebabkan keretakan dalam tubuh partai yang berimbas pada pembubaran. Dampak dari tindakan koruptif yang dilakukan oleh kader politik terhadap masyarakat umum dapat diidentifikasi dari beberapa beberapa sisi, yaitu politik, ekonomi dan sosial. Dari sisi politik, dampak korupsi akan mempengaruhi pada turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, dan cenderung mengubah pilihan politik, bahkan tidak ikut berpartisipasi lagi dalam politik, hal ini diperkuat dengan pandangan, selain itu dapat lahirnya fenomena “*plutokrasi*”, yaitu penguasaan sistem politik yang terpusat. Dari sisi ekonomi dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan nilai efisiensi ekonomi dalam skala besar, selain itu korupsi juga telah berdampak pada ketimpangan ekonomi dan pendapatan masyarakat (Gupta dan Alonso, 2002). Dari sisi sosial, bahwa telah terjadi kesenjangan hidup masyarakat, yang mengakibatkan adanya gap secara sosial masyarakat (Marchal & Wathen, 2012). Ketiga dampak tersebut ialah gambaran umum yang dapat kita abstraksikan ketika perilaku korupsi telah menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat.

Hasil Penelitian Svenson (2005) dalam Pradiptyo (2017, Hlm. 10) mengungkapkan bahwa “Korupsi ialah sebuah refleksi dari pemberlakuan hukum, perekonomian, lembaga kebudayaan dan politik”. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi ialah tindakan akibat yang dapat dipandang sebagai bentuk dari tatanan kehidupan sebuah negara, cakupannya luas, sebab dan akibatnya juga menyeluruh. Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa faktor penyebabnya ialah faktor sejarah, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Keempat faktor tersebut merupakan

Muhammad David, 2019

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

penyebab umum dari keterlibatan seseorang dalam perkara korupsi, ini menjadi perhatian sekaligus juga sebagai fenomena yang miris. Alasannya yaitu ketika kita membahas faktor sejarah, maka sudah selayaknya semua hal buruk yang diwariskan penjajah, menjadi musuh kita bersama sebagai satu bangsa yang menentangnya. Tinjauan ekonomi bahkan lebih miris, seperti yang kita ketahui, banyak diantara koruptor merupakan para pejabat yang memiliki tingkat ekonomi yang sangat baik. Selanjutnya, bahwa budaya maskulin sebuah negara dianggap berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Swamy, 2001, hlm 37). Terakhir ialah faktor kelembagaan, hal ini dinilai memang masih menjadi koreksi kepada semua pihak khususnya dalam hal pengawasan, maupun efisiensi kebijakan lembaga yang pada akhirnya dapat dipermainkan.

Apabila kita merujuk pada fenomena korupsi yang marak terjadi di Indonesia, maka partai politik ialah satu dari beberapa elemen yang ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana tidak, bahwa ketika kita bicara soal korupsi, maka tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran kita akan mengarah pada perilaku para koruptor yang sebagian besar dari kalangan kader partai politik. Mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk melanggengkan tindakan pelanggaran hukum untuk keuntungan pribadinya. Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi KPK) mengungkapkan bahwa “69 persen dari kasus korupsi yang ditindaklanjuti oleh KPK melibatkan pejabat pemerintah yang berasal dari partai politik” (<http://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/16245891/kpk-69-persen-orang-yangditangkap-kpk-berlatar-parpol>). Dari sudut pandang partai politik, ada beberapa alasan yang menyebabkan keterlibatan kader partai politik dalam kasus korupsi, yaitu lemahnya pendidikan politik, rendahnya pengawasan, tingginya tuntutan partai, dan adanya sokongan dari berbagai pihak. Keempat hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindakan koruptif bermuara pada dua hal, yaitu keinginan individu dan partai politik. Hal ini dapat kita tinjau bahwa muara keinginan individu dalam melakukan tindakan koruptif sepenuhnya dipengaruhi oleh hasrat pribadi yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat privat. Sedangkan muara partai dalam kasus korupsi dapat kita pahami, bahwa sistem politik kepartaian dewasa ini tidak lepas dari tuntutan materi, terlebih ketika seorang

Muhammad David, 2019

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

kader partai telah menjadi pejabat publik karena sokongan partai, maka mau tidak mau, bahwa tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dipungkiri.

Selain itu, kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana pentingnya keterlibatan partai politik dalam meregulasi berbagai persoalan, termasuk masalah korupsi. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa lemahnya pendidikan politik dan rendahnya pengawasan terhadap kader politik, secara tidak langsung telah mendorong selangkah para kader politik yang menduduki jabatan tertentu menuju gerbang penjara. Hal ini dikarenakan, tidak semua kasus korupsi dapat dikatakan sebagai langkah busuk yang diambil oleh elit politik dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya, melainkan juga pada soal lemahnya pengetahuan politik elit, sehingga ia tidak mengerti, apa yang telah diperbuat merupakan tindakan melanggar hukum, terlebih ia juga tidak paham bahwa ia berada dalam sebuah jebakan politik yang harus ia tanggung akibatnya. Permasalahan ini tentunya harus menjadi perhatian semua partai politik, khususnya dalam mempersiapkan kadernya sebelum terjun di dunia politik praktis. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan politik menjadi penting, bukan hanya sebagai seremonial belaka, melainkan juga sebagai bentuk eksistensi partai yang menginginkan sebuah kualitas elit politiknya.

Salah satu negara dengan tingkat pencegahan korupsi terbaik di dunia ialah Singapura. Penilaian ini didasarkan pada sistem pencegahan yang dilakukan sangatlah konperhensif. Dukungan terbesar dari upaya menurunkan angka korupsi di negara tersebut ialah melalui sistem politik. Bukan hanya itu, sebagaimana sistem ini juga dilengkapi oleh upaya pencegahan yang melibatkan pemanfaatan Komisi Anti Korupsi yang efektif. Sudut pandang dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan ialah melalui beberapa kegiatan, diantaranya: 1) Menekan pemerintah dan partai politik untuk serius dalam kegiatan pemberantasan korupsi; 2) Membentuk lembaga ahli antikorupsi, yang secara murni dapat menjadi contoh untuk lembaga lainnya; 3) Mengupayakan kredibilitas politik dan hukum; 4) Melakukan rekrutmen SDM secara objektif; 5) Mendisain muatan pendidikan politik yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan; 6) Mengukur tingkat

**Muhammad David, 2019**

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

**Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)**

kesuksesan dan kegagalan kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi (UNODC, 2004).

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap topik diatas, penulis mendapati ada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Benny (2011, Hlm. 77) yang mengungkapkan bahwa, “Partai politik yang memiliki kematangan secara konsep dan ideologi akan cenderung mempengaruhi kematangan politik para elitnya”. Hal ini menunjukkan bahwa ada pola yang saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, maka dari itu menjadi sangat relevan bila kita memandang bahwa konsep politik yang dibawa oleh idealisme partai politik akan membentuk identitas politik kader, meskipun masih punya kemungkinan bahwa identitas politik seseorang sulit untuk diubah. Namun, dengan adanya pendidikan politik yang baik, maka upaya penggiringan nilai politik tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhinya secara pemikiran maupun ideologi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Marume (2016, Hlm. 7) tentang konsep dan fungsi partai politik di negara demokrasi, mengungkapkan bahwa “Partai politik memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan politik, upaya pengawasan tersebut baik kepada pemerintah maupun internalnya sendiri”. Partai membantu politisi mengatasinya masalah koordinasi dengan menciptakan horizon waktu, karena politisi tertarik pada diri sendiri dan memiliki sangat sedikit motivasi untuk merencanakan inovasi (Natasha, 2011, Hlm. 5). Penelitian tersebut menunjukkan unsur relevansi, yaitu dalam hal memberikan penguatan terhadap kajian awal penelitian ini tentang bagaimana partai politik mampu memberikan dampak terhadap ideologi kader politiknya, serta bagaimana partai politik sebenarnya memiliki otoritas pengawasan kepada eksternal maupun internal. Namun secara mendalam, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kedudukan dan peran partai politik yang focus pada upaya pencegahan korupsi terhadap kadernya.

Penelitian yang dilakukan oleh Meyer (2013, hlm. 11) tentang peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi, menghasilkan sebuah konsepsi bahwa, “Peran partai politik dapat ditinjau dari kebijakan politiknya terhadap elit, khususnya dalam konsep politik maupun praktik politik”. Tinjauan ini dapat

**Muhammad David, 2019**

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

dijadikan sebagai landasan, bahwa politik peran yang dimainkan oleh lembaga politik setingkat partai, dapat kita amati melalui kebijakan politiknya terhadap para kader politik. Kebijakan partai politik ialah bukti dari keterlibatannya terhadap berbagai upaya yang diputuskan dan diambil demi kepentingan partai, tidak tekecuali dalam penyelesaian masalah korupsi. Maka dari itu hal-hal yang berkenaan dengan upaya memperbaiki sistem dan mencegah tindakan korupsi dapat menjadi bagian dari kebijakan partai politik.

Secara mendalam bahwa kasus korupsi yang marak terjadi di berbagai negara, telah menderap berbagai persoalan, yang sebenarnya hanya soal bagaimana uang yang ada dalam pusaran politik tidak mampu dikelola dengan bijak. Tingkat kepercayaan akan sebuah sistem akan menjadi kabur, dikarenakan tidak jelas esensi kebermanfaatannya terhadap publik. Ketidakpercayaan akan sebuah sistem telah merusak sistem itu secara terstruktur dan sistematis, bahkan pada proses demokrasi itu sendiri, apabila persoalan ini tidak disertai aksi perbaikan, maka yang terjadi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga dan actor politik akan selalu memunculkan kecurigaan masyarakat.

Akibat terakhir dari ketidakmampuan dan ketidakpercayaan terhadap sistem ini akan menjurus pada *stuck believe sistem*, Perdomo (2017, Hlm. 49) mengungkapkan dalam penelitiannya tentang uang dan pengaruh dari korupsi dan penangkapan bahwa, “Diperlukan pendekatan holistic untuk institusi politik yang demokratis dalam melawan pengaruh uang, untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong akuntabilitas”. Lebih lanjut bahwa tinjauan solusi dari upaya pencegahan korupsi juga dapat kita pelajari melalui penelitian yang dilakukan oleh Suwitri (2007, Hlm. 30) tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, bahwa “Perbaikan sistem rekrutmen, komunikasi dan integritas partai politik dapat memperkecil keterlibatan kader politik dalam kasus korupsi”. Kajian tentang perbaikan akan sebuah sistem yang cenderung rusak hakikatnya bukan hanya akan berdampak pada satu sektor saja, melainkan pada semua sektor kehidupan bangsa dan negara. Upaya perbaikan yang utama dapat kita fokuskan pada partai politik sebagai pilar demokrasi yang padanya teremban berbagai peran dan fungsi yang strategis.

Muhammad David, 2019

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Penelitian diatas menunjukkan relevansi, yaitu dalam tinjauan awal penelitian ini, Pertama, wujud dari peran partai dapat ditinjau melalui kebijakannya serta upaya memperkecil keterlibatan kader politik melalui perbaikan sistem politik internal. Kedua, adanya kedekatan antara kasus korupsi terhadap rusaknya integritas dan kepercayaan publik pada sistem demokrasi. Adapun penelitian ini, akan mengisi plot kajian yang belum tersentuh dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang bagaimana strategi yang diambil oleh partai politik, khususnya dalam hal mencegah tindak pidana korupsi.

Tinjauan masalah-masalah diatas membuat kajian ini menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa alasan berikut: *Pertama*, minimnya kajian tentang strategi partai politik dalam hal menerapkan pendidikan politik, khususnya dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. *Kedua*, tinjauan intervensi politik yang dilakukan partai politik hanya sebatas pada urusan jabatan politik tertentu, tidak pada tindakan dan etik para elit politik. *Ketiga*, partai politik cenderung tertutup dalam hal menyikapi kasus-kasus korupsi yang menjerat para elit. *Keempat*, tuntutan akan sebuah perubahan pada tatanan politik kearah yang lebih baik menjadi sebuah tantangan sendiri buat partai politik. *Kelima*, peran partai politik dalam menengahi kasus korupsi elitnya masih dapat dikatakan sebagai kajian yang focus pada isu-isu terbaru. Kelima alasan diatas membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, adapun subjek kasus dalam penelitian ini difokuskan pada DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat. Penentuan subjek penelitian kasus di DPW PKS Jawa Barat didasarkan pada pertimbangan berikut: PKS merupakan partai kader yang sejak lama berpartisipasi dalam kancah politik nasional; Partai pemenang pada Pemilihan kepala daerah Jawa Barat di dua periode; Minim akan catatan buruk dalam kasus korupsi; Akses terhadap sistem kepartaian yang terbuka; Partai yang memiliki program pendidikan politik berkala, berbentuk *tarbiyah* (pendidikan); DPW PKS Jawa Barat merupakan DPW PKS dengan jumlah masa terbesar di Indonesia. Dari beberapa alasan tersebut, maka peneliti menganggap bahwa DPW PKS Jawa Barat merupakan pilihan yang menarik dalam meneliti tentang bagaimana partai

Muhammad David, 2019

STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

dapat berperan dalam ruang lingkup tertentu, berkenaan dengan strategi, intervensi, dan perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada kadernya di wilayah Jawa Barat.

Pada akhirnya penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran dalam melihat peran sekaligus fungsi partai politik, khususnya di DPW PKS Jawa Barat, sebagai kendaraan politik yang diharapkan dapat menghasilkan kader politik yang mempunyai integritas, terutama terhindar dari perkara korupsi. Hal ini merujuk pada kajian tentang konsep partai politik yang bukan hanya sebagai kendaraan politik namun juga sebagai penyelenggara pendidikan politik bagi seluruh warga negara. Strategi-strategi yang dipilih partai politik dalam proses kaderisasi para elit politik berupa rekrutmen, penetapan calon elit politik, sampai pada pemetaan strategi dan metode yang diterapkan melalui pendidikan politik menjadi sebuah kajian penting dalam penelitian ini. Hal ini menjadi barometer kualitas partai politik. Terakhir, bahwa kajian ini juga akan merumuskan sebuah persepsi akan bagaimana DPW PKS Jawa Barat melihat pentingnya pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pendidikan politik. Termasuk juga soal intervensi partai terhadap kader, khususnya dalam upaya mencegah terjadi berbagai pelanggaran hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah dan realitas yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam berkenaan dengan kajian pendidikan politik tentang strategi partai politik dalam hal mencegah tindak pidana korupsi melalui penelitian yang berjudul “Strategi Partai Politik Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di DPW PKS Jawa Barat)”.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

Terkait dengan luasnya objek analisis dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam beberapa hal: Pertama, tingginya angka keterlibatan kader partai politik dalam kasus korupsi; Kedua, minimnya pendidikan politik; Ketiga, proses rekrutmen dan kaderisasi kader politik yang dinilai tidak selektif dan profesional; Keempat, rendahnya keterlibatan partai

Muhammad David, 2019

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

politik dalam hal meregulasi, mengantisipasi serta keikutsertaannya dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader partai.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi analisisnya pada beberapa hal berikut: pendidikan politik, strategi, intervensi, peran partai politik, tindak pidana korupsi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi DPW PKS Jawa Barat terhadap pentingnya pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan pendidikan politik?
2. Bagaimana penerapan pendidikan politik DPW PKS Jawa Barat dalam mencegah tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana Strategi DPW PKS Jawa Barat untuk mencegah tindak pidana korupsi yang melibatkan kader partai?
4. Bagaimana intervensi politik DPW PKS Jawa Barat terhadap kader partai untuk mencegah tindak pidana korupsi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi DPW PKS Jawa Barat terhadap pentingnya pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan pendidikan politik?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pendidikan politik DPW PKS Jawa Barat dalam mencegah tindak pidana korupsi?
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi DPW PKS Jawa Barat untuk mencegah tindak pidana korupsi yang melibatkan kader partai?
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana intervensi politik DPW PKS Jawa Barat terhadap kader partai untuk mencegah tindak pidana korupsi

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pendidikan politik terutama dalam meninjau strategi partai politik dalam menerapkan pendidikan politik terhadap kader politik khususnya dalam mencegah tindak pidana korupsi.
2. Manfaat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran akan bagaimana peran partai politik sebagai kendaraan politik yang sekaligus berfungsi sebagai organisasi pendidikan politik warga negara. Tindaklanjut dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan tentang pengelolaan organisasi politik terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Manfaat praktik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menganalisis pelaksanaan aturan hukum yang berlaku, meregulasi hal-hal yang kiranya masih belum mampu terjangkau sebelumnya. Penelitian ini dapat mendeskripsikan bagaimana strategi, intervensi, dan peran partai politik dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang secara khusus ada di DPW PKS Jawa Barat. Bagi partai politik, hasil penelitian ini menjadi refleksi atas keterlibatannya dalam hal mengelola organisasi sekaligus perannya dalam melihat persoalan dan dinamika politik yang dilakukan oleh kader politik.
4. Manfaat isu dan aksi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan pencerahan berkenaan dengan strategi, intervensi dan peran partai politik sebagai sarana pendidikan politik yang menghadirkan aksi sosial.

## **1.6 Struktur Organisasi Tesis**

Dalam tesis ini menguraikan pokok penting yang nantinya akan dijabarkan dalam beberapa bab diantaranya sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bagian ini penulis membahas tentang latar belakang yang berisi urgensi dari penelitian, dilanjutkan oleh deskripsi atas

Muhammad David, 2019

**STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS DI DPW PKS JAWA BARAT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

kesenjangan yang terjadi pada kasus korupsi, dilanjutkan dengan fenomena rasional berkenaan dengan ketimpangan yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan partai politik dalam kegiatan pendidikan politik bagi calon anggota legislatif. Uraian kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi didasarkan pada fakta dan data. Selanjutnya ialah identifikasi masalah penelitian yaitu dengan pengenalan terhadap masalah.

Bab II yaitu Kajian Pustaka. Pada bagian ini penulis membahas tentang kajian teori dan konsep yang dianggap relevan sebagai landasan dalam penelitian, yang kemudian dianalisis sehingga dapat membantu peneliti dalam kegiatan penelitian.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Pada bagian ini penulis membahas tentang desain penelitian, partisipan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan isu etik.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini penulis membahas hasil temuan lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dilanjutkan oleh pembahasan hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori-teori dan konsep yang relevan.

Bab V yaitu Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bagian ini penulis memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan.

Daftar Pustaka, berisi rujukan yang digunakan dalam menulis kajian mengenai “Strategi Partai Politik Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi”, sumber tersebut diantaranya buku, jurnal dan sumber internet. Selain itu terdapat sumber lain berupa sumber lisan yang telah diwawancarai oleh penulis dalam membantu proses penelitian.